UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENERAPAN PRINSIP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) DALAM PEMBERIAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PEMERINTAH ACEH
KAMAL FAHMI KURNIA, Aminoto, SH, MSi
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdurrahman, 1987, *Beberapa Pemikiran Tentang otonomi Daerah,* Media Sarana Press, Jakarta.

Akadun, 2007, *Administrasi Perusahaan Negara,* Alfa Beta, Bandung.

Asshidiqie, Jimly, 2002, *Konsolidasi Naskah UUD 1945 Pasca Perubahan Keempat*, PSHTN-UI, Jakarta.

_____, 2010, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia,* Sinar Grafika, Jakarta.

_____, 2015, *Gagasan Konstitusi Sosial*, LP3ES, Jakarta.

Astawa, I Gede Pantja, 2008, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, Alumni, Bandung.

Azhary, Mohammad Tahir, 1992,*Negara Hukum Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip dilihat dari Segi Hukum Islam,* Bulan Bintang, Jakarta.

Budihardjo, Miriam, 1980, *Masalah Kenegaraan,* Penerbit. Gramedia, Jakarta.

Djumala, Darmansjah, 2013, *Soft Power Untuk Aceh Resolusi Konflik dan Politik Desentralisasi*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Elmi, Bachrul, 2002, *Keuangan Pemerintah Daerah Otonom di Indonesia*, Universitas Indonesia Press, Jakarta.

Fauzan, Muhammad, 2006, *Hukum Pemerintahan Daerah Kajian Tentang Hubungan Keuangan Antara Pusat dan Daerah,* UII, Yogyakarta.

Gie, The Liang, 1982, *Teori Keadilan,* cetakan-2, Supersukses, Yogyakarta.

Hamid, Edy Suhandi & Sobirin Malian (Ed.),2004, *Memperkokoh Otonomi Daerah, Kebijakan, Evaluasi, dan Saran*, UII Press, Yogyakarta.

Huda, Ni'matul, 2005, *Otonomi Daerah (Filosofi Sejarah Perkembangan dan Problematika),* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

_____, 2014, *Desentralisasi Asimetris Dalam NKRI, Kajian Terhadap Daerah Istimewa, Daerah khusus dan Otonomi Khusus,* Nusa Media, Bandung.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENERAPAN PRINSIP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) DALAM PEMBERIAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PEMERINTAH ACEH
KAMAL FAHMI KURNIA, Aminoto, SH, MSi
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Ikhsanto, Miftah Adi & Wawan Mas'udi (edt) 2011, *Decentralized Governance*: *Sebagai wujud Nyata Dari Sistem Kekuasaan kesejahteraan dan Demokrasi*, Jurusan Politik dan Pemerintahan Fisipol UGM, Yogyakarta.

Kaho, Josef Riwo, 2001, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Karim, Abdul Gafar (Ed.), 2003, *Kompleksitas Persoalan Otonomi Daerah di Indonesia*, Kerjasama Pustaka Pelajar & Jurusan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Yogyakarta.

Khusaini, Mohammad, 2006. *Ekonomi Publik : Desentralisasi Fiskal dan Pembangunan Daerah.* BPFE Unibraw, Malang.

Koesoemahatmadja, R.D.H., 1979, *Pengantar Ke Arah Sistem Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Bina cipta, Bandung.

Kuncoro, Mudrajad, 2004, *Otonomi dan Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi dan Peluang*, Airlangga, Jakarta.

Kurde, Nukhtoh Arfawie, 2005, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Kusnardi dan Saragih, 1998, *Ilmu Negara*, cetakan II, Gaya Media Pertama, Jakarta.

Latief, Abdul, 2005, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta.

Latief, Yudi, 2012, *Negara Parpurna, Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Lubis, 1992, *Hukum Tata Negara,*cetakan ke-5, CV Mandar Maju, Jakarta.

Mahfud M.D, Moh., 1993, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta.

Manan, Bagir, 1993, *Perjalanan Historis Pasal 18 UUD 1945 (Perumusan dan Undang-Undang Pelaksanaannya),* UNISIKA, Jakarta.

_____, 2001, *Menyongsong Fajar Otonomi Daerah*, PSH FH-UII, Yogyakarta.

Marzuki, Peter Mahmud, 2005, *Penelitian Hukum*, cetakan ke-2, Kencana, Jakarta.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENERAPAN PRINSIP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) DALAM PEMBERIAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PEMERINTAH ACEH
KAMAL FAHMI KURNIA, Aminoto, SH, MSi
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Muchsan, 1997, *Sistem Pengawasan Terhadap Perbuatan Aparat Pemerintah dan Peradilan Tata Usaha Negara di Indonesia,* Liberty, Yogyakarta.

Rawls, John, 1995, *A Theory of Justice,* Harvard University Press, Cambridge, Massachusetts, telah dialih bahasa oleh Uzair Fausan & Heru Prasetyo, 2011, *Teori Keadilan: Dasar-dasar Filsafat Politik untuk mewujudkan kesejahteraan sosial dalam Negara,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Santoso, H.M Agus, 2013, *Menyingkap Tabir Otonomi Daerah di Indonesia,* Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Sapuan, 2010, *Impeachment Presiden,* Hexagon, Purwokerto.

Sarundajang, 2002, *Arus Balik Kekuasaan Pusat ke Daerah,* Pustaka Sinar Harapan, Jakarta.

Sidik, Machfud, Raksaka Mahl, 2002, *Dana Alokasi Umum: Konsep, Hambatan dan Prospek di Era Otonomi Daerah,* Kompas, Jakarta.

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat,* Rajawali Pers, Jakarta.

Soedjito, Irawan, 1990, *Hubungan Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Daerah,* Rineka Cipta, Jakarta.

Solossa, Jacobus Perviddya, 2005, *Otonomi Khusus Papua Mengangkat Martabat Rakyat Papua di Dalam NKRI,* Sinar Harapan, Jakarta.

Sumardjono, Maria S.W, 2012, *Bahan Kuliah Metodologi Penelitian Ilmu Hukum*, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Thalib, Abdul Rasyid, 2006, *Wewenang Mahkamah Konstitusi dan Implikasinya dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia,* Citra Aditya Bakti, Bandung.

Tjandra, W. Riawan, 2004, *Dinamika Peran Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Administrasi (analisis kritis terhadap perspektif penyelenggaraan pemerintahan),* UAJ Yogyakarta, Yogyakarta.

_____, 2008, *Hukum Administrasi Negara*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta.

Utrecht, 1994, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia,* Pustaka Tirta Mas, Surabaya.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENERAPAN PRINSIP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) DALAM PEMBERIAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PEMERINTAH ACEH
KAMAL FAHMI KURNIA, Aminoto, SH, MSi
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Makalah, Artikel, Jurnal dan Karya Ilmiah Lain

Herawati, Netty, 2008, "Analisis Pengaruh Desentralisasi Fiskal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Bandar Lampung", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Hijrah, Muhammad, 2014, "Pengaruh Dana Otonomi Khusus Terhadap Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten/Kota Di Provinsi Aceh", *Skripsi*, Fakultas Ekonomi: Universitas Syah Kuala, Aceh.

Husni, 2004, "Eksistensi Otonomi Khusus Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Berdasarkan UUD 1945", *Disertasi*, PPS Unpad, Bandung.

Jaweng, Robert Endi, "Anomali Desentralisasi Asimetris", Artikel, *Suara Pembaruan, Selasa, 21 Desember 2010*.

Musliadi, 2013, "Analisis Pengaruh Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Daerah, dan Belanja Modal Terhadap Kemiskinan Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh Tahun 2008-2012", *Tesis*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Resen, Made Gde Subha Karma, 2015, "Pengaturan Badan Usaha Milik Daerah Berdasarkan *Good Governance* dan *Good Corporate Governance"*, *Disertasi*, Universitas Gadjah Mada.

Taufieq, Muhammad, 2013, "Analisis Pengaruh Dana Perimbangan dan Dana Otonomi Khusus di Kabupaten/Kota Terhadap PDRB: Kasus Provinsi Aceh", *Tesis*, Fakultas Ekonomi: Unversitas Indonesia, Jakarta.

Triharyanto, Joko, 2016, "Desentralisasi Fiskal Seutuhnya", Artikel, Pegawai Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan RI, Jakarta.

Zanibar, Zen, 2003,"Otonomi Desa Dengan Acuan Khusus Pada Desa di Propinsi Sumatera Selatan", *Disertasi*, UI, Jakarta.

Zuhria P, Ira, 2015, "Analisis Dana Otonomi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal Terhadap Tingkat Kesejahteraan", *Tesis*, Fakultas Ekonomika dan Bisnis: Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Internet dan Kamus

http://syukriy.wordpress.com/2009/11/03/desentralisasi-asimetris-di-nad-papua-dan-diy/ diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

UNIVERSITAS GADJAH MADA
PENERAPAN PRINSIP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) DALAM PEMBERIAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PEMERINTAH ACEH
KAMAL FAHMI KURNIA, Aminoto, SH, MSi
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

http://wdavaipank.blogspot.com/2012/11/desentralisasi.asimetris.html?zx=14b2cc7a4ff9cc24 diakses pada tanggal 10 Januari 2016.

Departemen Pendidikan Nasional, 2008, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 Tahun 1999 Tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1948 tentang Pembagian Sumatra Dalam Tiga Propinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1948 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 146).

Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1955 tentang Pengubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Propinsi Di Sumatera (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 855).

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-Pokok Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2777).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839).

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893).

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENERAPAN PRINSIP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) DALAM PEMBERIAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PEMERINTAH ACEH
KAMAL FAHMI KURNIA, Aminoto, SH, MSi
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5254).

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5361).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5462).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587).

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 259, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5593).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5767).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 126 /PMK.07/2010 tentang Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Anggaran Transfer Ke Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 343).

Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 12).

UNIVERSITAS
GADJAH MADA
PENERAPAN PRINSIP NEGARA KESEJAHTERAAN (WELFARE STATE) DALAM PEMBERIAN DANA OTONOMI KHUSUS BAGI PEMERINTAH ACEH
KAMAL FAHMI KURNIA, Aminoto, SH, MSi
Universitas Gadjah Mada, 2016 | Diunduh dari http://etd.repository.ugm.ac.id/

Sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak Dan Gas Bumi Dan Penggunaan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 2).

Peraturan Gubernur Aceh Nomor 79 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Berita Daerah Aceh Tahun 2013 Nomor 71).